

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semuanya bertujuan untuk mengontrol dan mengatur laporan keuangan daerah agar benar-benar efektif, efisien, adil dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu diperhatikan aspek akuntabilitas publik dan transparansi. Hal ini dikarenakan adanya pemberian kewenangan secara luas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pemberian kewenangan tersebut dapat dikontrol yaitu dengan diwajibkannya pemerintah daerah untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 komponen, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dikatakan bahwa Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas

dimasa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pihak yang diserahi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewajiban untuk membangun dan meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten kupang secara demokratis, adil, merata, dan keseimbangan, agar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten kupang tidak terganggu ataupun terhenti karena kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan karena keterbatasan dana atau kas, maka pemerintah kabupaten kupang harus memperhatikan kondisi keuangan yang ada.

Berikut ini data laporan arus kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 1.1**  
**Laporan Arus kas Pemerintah Kabupaten Kupang**  
**Tahun Anggaran 2013-2016**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp
1.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	112.687.291.764,60	166.529.147.538,59	307.849.867.768,14	199.300.727.949,25
2.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(120.296.377.363,00)	(123.438.585.034,00)	(151.655.662.760,00)	(409.656.705.681,00)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	51.495.128.913,37	569.621.732,01	(15.120.743.644,00)	(476.487.416,00)
4.	Arus Kas Dari aktivitas Transitoris	4.959.064.187,00	613.500.475,96	7.657.204.094,18	(4.538.996.597,00)
5.	Kenaikan/Penurunan Kas	48.845.107.501,97	44.273.684.712,56	148.730.665.458,32	(215.371.461.744,75)

*Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang 2017*

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa laporan Arus Kas yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kupang dari Tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa : Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional tahun 2013 sebesar Rp.112.687.291.764,60, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.199.300.727.949,25. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invetasi Aset Non Keuangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 120.296.377.363,00 kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.495.128.913,37 , pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 569.621.732,01, selanjut pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.120.743.644,00, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 476.487.416,00. Jumlah Arus Kas dari aktivitas Transitoris pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.959.064.187,00, pada tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar Rp. 613.500.475,96 selanjutnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.657.204.094,18, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.538.996.597,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa Laporan Arus Kas yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2013-2016 menunjukkan kondisi keuangan mengalami fluktuasi.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kupang perlu membenahi cara pengelolaan Kas agar dapat menyeimbangkan kondisi keuangan pemerintah. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013-2016”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimanakah perkembangan Arus Kas dilihat dari aspek pertumbuhan, arus kas perkomponen dan arus kas bebas dalam laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Kupang ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan laporan arus kas dilihat dari aspek pertumbuhan, arus kas perkomponen dan arus kas bebas dalam Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2013-2016.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang :

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan mengenai hasil analisis laporan keuangan arus kas tahun anggaran 2013-2016 dan implikasinya terhadap penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Kupang

### b. Bagi peneliti lain :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terutama bagi para akademis yang ingin menganalisis tentang Analisis Laporan Arus Kas.

